

Fuad Muhammad Syafruddin: Pejuang lokal, berwawasan global

Oleh David T. Hill*

Di tengah kalang-kabut yang mengelilingi musibah wafatnya almarhum Fuad Muhammad Syafruddin masih dicari titik terang. Barangkali, lepas dari rasa sedih serta kehilangan, ada sebuah warisan yang cenderung memberi harapan pada rekan-rekan seprofesi yang ditinggalkannya.

Nama Udin (rasanya nama panggilannya sudah menjadi begitu akrab bagi pembaca pers Indonesia belakangan ini!) akan terpahat pada sejarah kewartawanan Indonesia, sebagai syahid yang rela mengorbankan segala-galanya untuk prinsip yang dijunjung tinggi olehnya.

Patut dibanggakan bahwa Indonesia mempunyai suatu tradisi kewartawanan yang luhur. Dari langkah awal para perintis pergerakan kemerdekaan, seperti RM Tirto Adisuryo dan kawan-kawannya, dilihat betapa ampuh pers sebagai wadah menampung semangat perjuangan mencapai negara yang lebih adil dan lebih makmur merata. Maka secara turun-temurun, pada setiap generasi, dituntut dari pekerja pers semangat iklas serta pengorbanan besar dalam upayanya berbhakti kepada prinsip tersebut.

Tetapi terlalu sering sorotan utama dari pencatat sejarah profesi diarahkan kepada jurnalis kondang yang cenderung tinggal di ibukota. Seakan-akan untuk berbakti kepada rakyat dan profesi seseorang harus merantau ke Jakarta, dan mengidamkan semua yang 'besar'. Bekerja pada suatu koran yang besar - besar oplagnya, besar modalnya. Mengejar berita (nasional maupun internasional) yang 'besar', yang berkaitan dengan orang pembesar. Dan dalam menulis beritanya, harus berteriak besar, dalam huruf besar, menuntut perhatian besar.

Sehingga akhirnya sang wartawan membina suatu reputasi yang serba besar. Seakan-akan dalam dunia jurnalistik, seperti pula dalam masyarakat luas, tiada tempat bagi orang yang 'biasa' (dalam segala konotasi positif kata tersebut), orang yang bukan kelas kakap penghuni ibukota, tapi yang hidup sederhana di daerah dalam segala kesusahannya.

Memang, dalam membina suatu tradisi kewartawanan, setiap generasi perlu orang 'besar' seperti RM Tirto Adisuryo, **Djawoto**, Mochtar Lubis, PK Oyong, Goenawan Mohamad serta puluhan lain yang ikut berperan dalam menggariskan kerangka profesi di Indonesia.

Tetapi bagi pekerja industri pers sekarang, rasanya mungkin yang lebih diperlukan malah jasa-jasa serta contoh teladan yang diberikan oleh orang yang tidak berpretensi menjadi 'tokoh besar'. Seorang 'biasa' yang berani berbuat 'luar biasa', tidak tanpa takut, tidak tanpa ragu, namun tetap berpegang pada prinsip kejujuran dalam apa yang ditulisnya, sehingga tegas bertahan melawan ancaman serta bahaya yang dilontarkan kepada diri serta orang yang dicintainya.

Dapat dicatat disini risiko yang dihadapi oleh ratusan pekerja pers yang kehilangan nafkahnya karena Tempo, Editor, dan DeTik dibredel oleh Menteri Penerangan pada Juni 1994. Juga mereka yang terlantar karena Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggagalkan usaha Simponi menampung orang-orang eks-Detik beberapa bulan kemudian.

**Lebih-lebih lagi pengorbanan aktivis pers, seperti Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) serta Tri Agus S. Siswomihardjo dari lembaga swadaya masyarakat PIJAR, yang bersedia dipenjarakan bagi prinsip hak berorganisasi serta hak kebebasan berekspresi para pekerja pers. Tampaknya kalau orang menolak paksaan mengakui organisasi tunggal' serta menuntut hak berorganisasipun ada risikonya.

Lihat saja puluhan anggota AJI yang lain yang sedang susah mencari nafkah karena diincar terus oleh PWI sendiri.**

Tetapi betapapun pedih pengalaman pekerja pers tersebut dalam menghadapi kekuatan politik nasional, masih kalah dengan musibah yang menimpa Udin, ketika dia berusaha mengembangkan tugas di Bantul. Menghadapi berbagai tantangan, berbagai kekuatan politik, serta berbagai ancaman fisik, sesuai dengan tradisi kewartawanan yang paling agung, beliau tetap tidak mundur. Dari penanya tetap mengalir puluhan artikel (yang sebagiannya termuat di dalam buku ini) yang mencerminkan betapa ampuh serta tajam senjata wartawan. Namun, akhirnya pada saat yang kritis, Udin tidak mampu menyelamatkan dirinya.

Yang tertinggal, antara lain adalah tulisan-tulisannya, yang dapat dijadikan warisan bagi generasi penerus profesi kewartawanan, dari yang bekerja di ibukota sampai yang di desa sekecil apapun. Tulisannya membuktikan bahwa bagi seorang wartawan teladan perjuangan melawan ketidakadilan tidak bergantung pada besar-kecil pelanggaran hukum ataupun kezaliman, tetapi pada kuat-tidaknya semangat serta prinsip moral si kuli papan ketik'.

Kasus yang diangkat oleh Udin mungkin bukan kasus 'besar' berskala nasional (walaupun mungkin ada pembesar yang terlibat). Tapi yang lebih menonjol adalah kepekaannya terhadap penderitaan orang 'kecil', orang biasa, yang tidak punya penyambung lidah, yang terjepit oleh ketidakadilan, menjadi korban penyelewengan orang kuat yang berpikiran kerdil. Disitulah peranan seorang wartawan. Mengangkat suara rakyat sampai terdengar oleh yang berwenang sampai ada yang mampu serta rela mengkampanyekan hak-hak mereka.

Kalau kita simak sebentar kumpulan tulisan Udin ini, kelihatan sekali betapa erat masalah yang dihadapi oleh orang Bantul dengan apa yang dialami masyarakat Indonesia pada umumnya. Misalnya, dalam tulisan "Petuah Politik", Badai yang datang di Bantul' (9 Juli 1996), Bupati Bantul mengajurkan kepada kepala desa di wilayahnya agar Golkar dimenangkannya dengan 200 persen dalam Pemilu yang akan datang. Ucapan ini tidak jauh berbeda dari apa yang kita lihat hampir setiap malam di televisi, atau baca dalam setiap koran, ditegaskan oleh berbagai pejabat pemerintah yang juga memegang peranan kunci dalam Golkar. Apakah tidak ada suatu 'conflict of interest' (konflik kepentingan) antara tugas pegawai negeri yang juga juru-bicara OPP? Seperti yang dipertanyakan tulisan Udin, ada kepincangan visi politik 'wakil rakyat' yang merasa bahwa tidak ada bedanya antara posisi mereka sebagai pejabat partai/OPP dengan kewajiban mereka sebagai abdi masyarakat' untuk tidak berpihak, melainkan berdiri di atas politik kepartaian supaya dapat melayani semua warganya, dan bukan hanya yang Golkar.

Dalam melaporkan pemilihan kepala desa di wilayah Bantul, tulisan Udin mencerminkan betapa penting proses demokratis serta langkah demokratisasi dalam menentukan wakil rakyat. Jangan sampai hasilnya direkayasa saja. Andaikata warga setempat merasa dirugikan, tuntutlah hak, angkatlah masalah tersebut ke Lembaga Bantuan Hukum, ataupun ke pengadilan.

Rasanya, bagi Udin, pelanggaran hak di desa sekecil apapun mengandung di dalamnya bahaya bagi masa depan bangsanya. Justru disitulah akar suatu demokrasi yang sehat.

Janganlah menganggap 'rakyat masih bodoh', massa mengambang', 'orang desa tidak tahu menahu politik', 'tidak berhak berpolitik', harus 'dibina', dan sejuta eufemisme yang begitu sering kita dengar sebagai suatu dalih atau rasionalisasi agar rakyat tidak diberi hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Maka sering yang ditonjolkan Udin dalam tulisannya adalah proses rakyat menuntut hak - kalau digusur, kalau ditipu, kalau dimasabodohkan, kalau tidak diperlakukan dengan adil oleh instansi ataupun orang yang berkuasa. Kehidupan Udin mencerminkan pepatah yang telah diangkat sebagai misi oleh berbagai gerakan pembaharuan sosial-politik di seluruh dunia: 'Think globally, act locally' (Berpikirlah tentang masalah global, bertindaklah di lingkungan sendiri').

Kesannya dari apa yang ditulis Udin, dia tekun berperan sebagai 'watchdog', atau 'anjing penjaga' demokrasi. 'Anjing penjaga' ini bertugas membela dan berpihak kepada masyarakat yang dirugikan. Memberitakan masalah seperti seadanya saja. Tidak pandang bulu, siapa yang akan tersinggung, siapa yang akan berang. Tolok ukurannya, kepentingan masyarakat untuk informasi agar mereka betul-betul mengetahui apa yang terjadi dalam lingkungan disekitarnya. Namun, rasanya kasus-kasus yang diangkatnya memang mengandung prinsip yang relevan pula pada politik panggung nasional. Prinsipnya sama, hanya lokasinya yang jauh dari kemewahan dan sorotan ibukota.

Sudah jelas dari Udin, sebagai masyarakat, kita akan rugi sendiri kalau kita hanya mengukur 'kebesaran' seseorang dari apa yang tercapai olehnya di ibukota, pada panggung nasional. Suatu insiden kezaliman pada tingkat lokalpun mempunyai gema serta dampak juga pada sistem sosial-politik suatu negara. Malah, kebanyakan orang yang berbakti kepada masyarakat menghabiskan masa hidup mereka di lingkungan lokal, berupaya se bisa-bisanya untuk memperbaiki keadaan hidup bagi masyarakat sekitarnya tanpa mengharapkan hadiah, kehormatan khusus, atau gelar 'Pahlawan Nasional' sekalipun dari yang berkuasa. Justru disitulah kepahlawannya.

* * * *

"Kalau mau jadi wartawan Indonesia syaratnya satu: harus gila dulu!", komentar seorang wartawan Yogyakarta belum lama ini, ketika merenungkan betapa besar risiko yang ditanggung para rekannya.

Tidak dapat disangkal bahwa yang membawa malang pada Udin adalah keiklasan serta kejuruan dalam melaksanakan tugasnya sebagai wartawan. Antara lain, peliputan beberapa kasus hangat di daerah Bantul. Dalam mengeritik penyelewengan, dia memancing harimau yang bangkit memakannya. Tetapi keganasan yang memangsa Udin muncul juga di berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Di Indonesia khususnya bulan-bulan belakangan ini ada serangkaian tindakan kekerasan terhadap wartawan. Ada yang kameranya disita, filemnya dicopot, kepalanya digebukin, ditahan tanpa alasan yang jelas.

Sepertinya di tanah airnya sendiri wartawan malah sekali-sekali bekerja laksana 'koresponden perang', dengan selalu menjaga keselamatan fisiknya serta was-was terhadap kekuatan yang ingin memaksa kekuasaannya. Ada yang 'dimintai keterangan' pihak keamanan hanya karena hadir di sebuah diskusi di salah satu LSM dalam rangka tugas sebagai wartawan. Tidak segawat itu barangkali tapi masih amat menguatirkan, banyak jurnalis lain pernah mengalami telepon- telepon gelap berisi ancaman ataupun maki-makian, macam-macam.

Berbagai rintangan dipasang untuk menghalangi wartawan memperoleh informasi yang patut diberitakan kepada masyarakat. Ringkasnya, tetap ada intimidasi dari berbagai pihak yang berusaha membendung atau mengontrol arus informasi bebas.

Masih banyak contoh lagi bahwa yang berwenang belum tentu menghormati peranan pers serta menerima tugas insan media massa sebagai sesuatu yang dituntut oleh masyarakat.

Malah sering wartawan dianggap sebagai gangguan yang harus diusir atau 'diberi pelajaran'. Kalau dari instansi pemerintah belum ada 'kode etika' dalam hubungannya dengan pers untuk mengatur tingkah laku pejabat supaya tidak sewenang-wenang, tidak mungkin kejadian yang mengerikan seperti yang dialami oleh berbagai wartawan Indonesia belakangan ini dapat dihindari.

Sebagai masyarakat manusiawi barangkali sudah tiba saat kita mencari jalan keluar bagi wartawan. Agar dia dapat selamat dari risiko serta bahaya yang ternyata mengancam para pekerja pers yang berani menulis apa adanya tanpa menyensor diri, tanpa dibikin bungkam karena risikonya. Mungkin sebagian saja dari bahaya itu dapat dihapuskan oleh masyarakat supaya tidak harus hanya dipikul oleh wartawan sendiri.

Barangkali salah satu cara adalah kalau masyarakat ikut bertanggungjawab bagi keselamatan pekerja pers. Misalnya, kalau kasus Udin dapat diselesaikan secara tuntas, adil dan terbuka, tanpa ditutup-tutupi atau dicari 'kambing hitam'. Jangan-jangan kasus Marsinah terulang lagi. Dalam hal ini, usaha Tim-tim Pencari Fakta, baik yang dari PWI **maupun dari AJI**, serta perhatian dan komentar dari Komnas HAM merupakan suatu langkah maju yang patut dipuji. Sangat penting agar rekan-rekannya yang seprofesi tetap mengedepankan kasus Udin pada setiap kesempatan di media massa agar tidak mungkin dipetik oleh orang yang akan kena getah dari penyelidikan tuntas.

Namun, yang tetap diperlukan adalah meningkatnya kesadaran serta kepedulian masyarakat agar ancaman terhadap wartawan dilihat juga sebagai ancaman bagi masyarakat sendiri serta bagi hak asasi akan arus informasi yang bebas. Semoga akhirnya dalam kasus Udin ini, yang bersalah dihukum, dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum. Semoga pula pembunuhan terhadap pekerja pers tidak terjadi lagi di Indonesia. Semoga pengorbanan Udin melahirkan beribu-ribu udin-udin yang baru dalam dunia pers Indonesia yang kesemuanya tetap berjuang untuk kebebasan informasi serta hak asasi rakyat biasa, betapapun jauhnya dari sorotan Jakarta.

Dr David T. Hill, pengarang buku *The Press in New Order Indonesia* (Pustaka Sinar Harapan, 1995), adalah peneliti di Asia Research Centre, sekaligus dosen senior Jurusan Pengkajian Asia, di Universitas Murdoch, Australia Barat.